Vol. 9, No. 1, 2023, pp. 334-340
DOI: https://doi.org/10.29210/ 020231920

Contents lists available at Journal IICET

JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi

Analisis potensi pembentukan kawasan industri hasil tembakau dalam perspektif ekonomi

Nurdiana Mulyatini*), Elin Herlina, Dendy Syaiful Akbar, Faisal Haris Eko Prabowo
Fakultas Ekonomi, Universitas Galuh, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jul 09th, 2022
Revised Aug 10th, 2022
Accepted Oct 31st, 2022

Keyword:

Kawasan industri hasil tembakau,
Dana bagi hasil cukai hasil tembakau,
Pertumbuhan ekonomi

ABSTRACT

Tembakau merupakan salah satu komoditas perdagangan yang bernilai tinggi dan mampu menggerakan ekonomi nasional. Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan pembinaan bagi pengusaha hasil industri tembakau serta menumbuhkan industri lokal. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis potensi Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kabupaten Ciamis dalam perspektif Ekonomi. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriftif Kualitatif. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil Penelitian menunjukan Kabupaten Ciamis layak untuk mendirikan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) dilihat berdasarkan potensi ketersediaan bahan baku lokal, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kontribusi PDRB, peningkatan investasi dan peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau.

© 2023 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Corresponding Author:

Nurdiana Mulyatini,
Fakultas Ekonomi, Universitas Galuh, Indonesia
Email: dianamulya@ymail.com

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tanaman tembakau terbesar di dunia. Kualitas tembakau lokal sangat diperhitungkan di pasar internasional (Ardhiarisca et al., 2015). Kementerian Pertanian mencatat pada tahun 2020 produksi tembakau terbesar yaitu Jawa Timur mencapai 85 ribu ton, diikuti .Jawa Tengah dengan produksi mencapai 48,3 ribu ton dan Nusa Tenggara Barat dengan produksi mencapai 46 ribu ton. Industri rokok di dalam negeri telah meningkatkan nilai tambah dari bahan baku lokal berupa hasil perkebunan seperti tembakau dan cengkeh, nilai tambah di sektor padat karya dan nilai tambah yang berorientasi ekspor sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi (Wandita, 2020). Kementerian Perindustrian mencatat total tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri rokok sebanyak 5,98 juta orang, terdiri dari 4,28 juta adalah pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, serta sisanya 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan.

Industri hasil tembakau termasuk tembakau merupakan komoditas yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keberadaannya bahkan sudah mengakar hingga menjadi sebuah budaya dalam kehidupan masyarakat di Indonesia (Bashori, 2022). Selain itu industri hasil tembakau juga menjadi salah satu sektor strategis hasil perkebunan yang memiliki daya saing tinggi dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. meliputi penyerapan tenaga kerja, pendapatan negara melalui cukai (Anggraeni, 2018). Keberadaan industri hasil tembakau menjadi bantalan pendapatan negara, kontribusi cukai rokok mencapai 96 persen. Data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Kementerian Keuangan, pendapatan cukai tahun 2021 mencapai Rp 180 triliun. Namun demikian, produk IHT merupakan barang kena cukai untuk mengendalikan konsumsinya. Sebagai konsekuensinya, peraturan terkait rokok semakin ketat karena pertimbangan perlindungan konsumen dan Kesehatan (Sarosa & Purwanti, 2018).

Dengan tingginya pendapatan dari cukai tersebut maka pemerintah melakukan earmarking yaitu pendekatan pengelolaan keuangan publik, khususnya bidang penganggaran atau pengalokasian belanja ((Kadar, 2018); (Wulandari, 2019)). Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 yang menjelaskan DBHCHT dialokasikan menjadi 25% untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, serta 25% untuk penegakan hukum, khusus untuk bidang kesejahteraan umum pada aturan ini dijelaskan alokasi bidang kesejahteraan masyarakat di breakdown menjadi 20% untuk membantu peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan keterampilan kerja, pembinaan industri, serta 30% untuk pemberian bantuan.

PMK No. 206/PMK.07/2020 sebagai program pembinaan industri untuk mendukung bidang penegakan hukum meliputi kegiatan pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau (KIHT) dimana peraturan tersebut bersinergi dengan Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 21/PMK/2020 tentang Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Berdasarkan PMK tersebut KIHT adalah kawasan pemusatan kegiatan industri hasil tembakau yang dilengkapi dengan prasarana, sarana serta fasilitas penunjang industri hasil tembakau yang disediakan, dikembangkan, dan dikelola oleh pengusaha kawasan industri hasil tembakau (Moshtari & Sami, 2016). Tujuan dari Pembentukan KIHT adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan, pembinaan industri, dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran hasil tembakau, sehingga mampu menarik pabrik-pabrik rokok lokal atau UMKM yang ilegal untuk mendapatkan pembinaan dan menjadi salah satu solusi untuk pemberantasan rokok illegal (Irwandi, S. : 2018). Pada dasarnya pembangunan KIHT diperuntukkan untuk mendukung IKM/UKM yang merupakan jenis usaha terbesar di Indonesia, sehingga nantinya dapat mendorong tumbuhnya perekonomian, yang dimulai dari daerah sampai nantinya akan membantu perekonomian nasional. (Haryono, I. 2007). Industri Hasil Tembakau mempunyai peran cukup besar terhadap penerimaan negara melalui pajak dan cukai, penyerapan tenaga kerja, penerimaan, dan perlindungan terhadap petani tembakau dan dampak ganda lainnya. Pengembangan IHT juga memperhatikan kesehatan masyarakat di samping tetap mengusahakan agar industri dapat tumbuh dengan baik. (Ardiansyah, N. I.2020)

Pelaksanaan kegiatan pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan KIHT berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.Pembangunan KIHT yang menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional, sehingga industri kecil hasil tembakau di masing-masing daerah mampu bersaing dan mampu menopang perekonomian daerah (Mepriyanto & Saptutyningsih, 2019).

Tabel 1. Potensi Industri Hasil Tembakau (IHT) Indonesia

Investasi	Perusahaan Multinasional memilih Indonesia sebagai Basis produksi untuk ekspor produk ke negara tujuan secara global
Penyumbang Devisa	1. Tahun 2019 lebih dari USD 900 juta per tahun melalui ekspor IHT 2. Indonesia menjadi eksportir No 6 IHT
Kontribusi dalam APBN	Penyumbang penerimaan terbesar dari Cukai Hasil Tembakau (CHT), PPh, PPN
Keterkaitan Sektor Hulu dan Hilir	1. Menyerap lebih dari 650 ribu tenaga kerja IHT 2. Melibatkan jutaan pelaku usaha disektor distribusi dan retail
Pangsa Pasar	Industri rokok mempunyai pangsa pasar dalam negeri sebesar 95%
Penyerapan Bahan Baku Lokal	Menyerap hampir seluruh produksi tembakau lokal dan Menyerap 90% produksi cengkeh nasional

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Peluang investasi terbuka bagi usaha perkebunan yang terintegrasi dengan unit pengolahan seperti perkebunan tembakau dan industri daun tembakau kering, (Ardiansyah, 2020). Sebagian besar IHT terkonsentrasi di Jawa Timur (Gudang Garam, HM Sampoerna, Bentoel, Japan Tobacco International,

KT&G, Gelora Djaya); Jawa Tengah (Djarum, Nojorono, Djambu Boel, Djitoe, Gentong Gotri. dan Jawa Barat (Philip Morris Indonesia / HM Sampoerna serta Sumatera Utara (Sumatra Tobacco Trading Company)

Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Provinsi Jawa Barat berdasarkan data dari Dirjen Bea dan Cukai segera didirikan dengan pertimbangan banyak pelaku usaha kecil memproduksi rokok asli daerah bahkan ada yang sudah ekspor luar Negeri. Begitu juga dengan Kabupaten Ciamis berdasarkan data dari Dinas Pertanian teridentifikasi terdapat 5 Desa dari 3 Kecamatan (Pamarican, Banjarsari dan Purwadadi) yang memiliki Industri tembakau dan terdapat 2 perusahaan (Industri Hasil Tembakau) yaitu PR Dasmil dan PT Prima Jaya Tobacco. Tentu saja ini menjadi peluang untuk pendirian Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.

Selain itu tanah menjadi tempat media tumbuh dan berkembang bagi tanaman. Selain itu, tanah juga menjadi sumber mineral, unsur hara, air, serta udara (Utomo et al., 2016). Karenanya budidaya tanaman tembakau di seluruh Indonesia yang bermutu baik hanya bisa diperoleh di daerah tertentu saja. Daun tembakau yang berkualitas bisa ditentukan sama lokasi penanaman serta pengolahan pascapanennya. Teknik budidaya yang baik harus memperhatikan berbagai faktor. Faktor tersebut yaitu halhal yang secara langsung dan tidak langsung bisa mempengaruhi mutu daun tembakau (Candra, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh (Kasim & Taiyeb, 2022) menunjukan hasil bahwa berasarkan indikator keberhasilan Program pengembangan Kawasan bebas asap rokok mengalami peningkatan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Cahyanti, 2018) menunjukkan bahwa hasil dari SWOT Analisys menunjukkan pada posisi kuadarn I (agresif) yang artinya dalam pengembangan Kawasan industri tembakau harus maju terus dengan menggunakan seluruh kekuatan yang merupakan factor internal untuk memanfaatkan peluang yang merupakan faktor eksternal yang ada. Berdasarkan paparan tersebut penelitian ini digunakan untuk menganalisis potensi yang mendukung terbentuknya Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kabupaten Ciamis berdasarkan perspektif ekonomi.

Metode

Dalam penelitian ini Metode yang digunakan yaitu deskriptif Kualitatif yang menjelaskan seluruh permasalahan yang belum teridentifikasi agar dapat dijelaskan secara lebih mendalam berdasarkan data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder (Gunawan, 2022). Dalam Penelitian ini Data sekunder berupa data Product Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Industri dan angkatan kerja. Juga didapatkan data data dari hasil Riset peneliti terdahulu. Data primer diperoleh dari petani dan pengusaha dari 3 kecamatan yang teridentifikasi yaitu Banjarsari, Pamarican dan Purwodadi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian (Anggito & Setiawan, 2018). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2019:321) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, disebutkan dalam rangka penyediaan infrastruktur dan peningkatan investasi yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional maka dilakukan percepatan pembangunan di Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan yang meliputi kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Kondisi tersebut menjadi salah satu pendorong rencana pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Ciamis.,

Pemerintah Kabupaten Ciamis memacu peningkatan ekonomi masyarakatnya di berbagai sektor, salah satunya di Sektor perindustrian yang merupakan sektor yang memiliki potensi yang besar dalam menyokong perekonomian Kabupaten Ciamis di masa yang akan datang. Gambaran umum kabupaten Ciamis terlihat dari data berikut :

Geografi

Luas wilayah Kabupaten Ciamis adalah 1.536,84 km2, wilayah paling tinggi Kecamatan Sukamantri 842 mdpl dan terendah Kecamatan Lakbok 31 mdpl. penggunaan lahan perkebunan dengan luas 23,70%, permukiman dengan luas 19,96%, dan sawah 17,74% dari luas Kabupaten Ciamis.Secara administratif pemerintahan, wilayah Kabupaten Ciamis terbagi menjadi 27 kecamatan, 258 Desa/ Kelurahan.

Kependudukan

Pada tahun 2020 penduduk Ciamis sebanyak 1.398.346 juta jiwa. Dengan LPP sebesar 2,34 % per tahun. Pada Tahun 2020 jumlah angkatan kerja Kab. Ciamis sebanyak. Sebanyak 612.055 orang, dengan rata-rata serapan tenaga kerja setiap tahun mencapai 94,87%. Hal tersebut menunjukan SDM Kabupaten Ciamis memiliki kontribusi dalam dunia kerja di berbagai sektor

Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Ciamis

Industri Non Migas

Laju Pertumbuhan ekonomi non migas tumbuh sebesar 3 %, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

Tabel 2. Proyeksi PDRB Industri Non Migas 2019-2039

Lapangan Usaha /Industri	2019	2024	2029	2034	2039
Industri Non Migas	1.604.810,42	1.657.432,34	1.711.779,74	1.767.909,20	1.825.879,15

Sumber: RPIK Ciamis, 2019-2023

Industri Kecil

Industri Kecil menjadi salah satu penopang perekonomian daerah. Dibawah ini data Historis Industri Kecil Kabupaten Ciamis, sebagai berikut :

Tabel 3. Proyeksi Jumlah Industri Kecil Kabupaten Ciamis

No	**Jenis Industri**	**Tahun**				
		2019	**2024**	**2029**	**2034**	**2039**
1	Industri Kecil Formal	1.382	1.437	1.494	1.552	1.614
2	Industri Kecil Informal	8.911	9.036	9.162	9.290	9.420

Sumber: RPIK Ciamis, 2019-2023

Industri Menengah

Industri menengah di Kabupaten Ciamis memiliki kontribusi terhadap perekonomian Ciamis, dengan proyeksi laju pertumbuhan sebesar 2%, sebagai berikut :

Tabel 4. Proyeksi Jumlah Industri Menengah Kabupaten Ciamis

Jenis Industri	2019	2024	2029	2034	2039
Industri Menengah	10	10	11	11	11

Sumber: RPIK Ciamis, 2019-2023

Tenaga Kerja

Tenaga Kerja menjadi salah satu potensi terbangunnya industri baru di Kabupaten Ciamis. Laju Pertumbuhan jumlah tenaga kerja 25 untuk Industri Menengah, 4% untuk industri Kecil Formal dan 1 % untuk Industri Kecil Informal.

Tabel 5. Proyeksi Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil Menengah Kabupaten Ciamis

No	**Jenis Industri**	**Tahun**				
		2019	**2024**	**2029**	**2034**	**2039**
1	Industri Menengah	1.104	1.126	1.148	1.171	1.195
2	Industri Kecil Formal	16.748	17.409	18.095	18.808	19.550
3	Industri Kecil Informal	28.746	29.149	29.556	29.970	30.389

Sumber: RPIK Ciamis, 2019-2023

Investasi

Laju pertumbuhan Investasi industri menengah sebesar 75%, industri kecil formal sebesar 32% dan industri kecil informal sebesar 5%.

Tabel 6. Proyeksi Jumlah Investasi Industri Kecil Menengah Kabupaten Ciamis

Jenis Industri	Tahun				
	2019	2024	2029	2034	2039
Industri Menengah	73.223.805	128.270.949	224.700.646	393.622.879	689.535.049
Industri Kecil Formal	72.782.287	96.433.044	127.769.164	169.288.023	224.298.521
Industri Kecil Informal	14.419.373	15.099.743	15.812.216	16.558. 306	17.339.601

Sumber: RPIK Ciamis, 2019-2023

Analisis potensi Ekonomi dalam mendukung Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Kabupaten Ciamis.

Di Kabupaten Ciamis terdapat 3 kecamatan dan 5 Desa yang menjadi penghasil tembakau dengan beberapa varietas yang ditanam yaitu Darmawangi, Jember cili dan Sano (temanggi) dengan sebaran wilayah yaitu :

Tabel 7. Wilayah Penghasil Tembakau di Kabupaten Ciamis

No	Kecamatan	Desa	Potensi
1	Pamarican (Luas Lahan 5 Ha, produksi 18 ton)	Margajaya	● Hasil tembakau sudah dirajang menjadi Bako. ● Wilayah Pemasaran Sumedang
		Bantarsari	● Luas lahan 2 Ha dengan jumlah petani 30 orang dan 7 kelompok tani ● Hasil Tembakau dijual basah ● Wilayah Pemasaran Sumedang dan Garut
2	Banjarsari (Luas Lahan 4 Ha, produksi 25 Ton)	Ciulu	● 40 anggota tergabung di Gapoktan Badak Jalu ● Pemasaran wilayah Ciamis
		Cicapar	● Pemasaran wilayah Ciamis
3	Purwadadi (Luas lahan 1 Ha, Produksi 4 ton)	Bantardewa	● Pemasaran wilayah Ciamis

Sumber: RPIK Ciamis, 2019-2023

Selain itu di Kabupaten Ciamis terdapat Perusahaan industri Hasil Tembakau (perusahaan Rokok) yaitu :

Tabel 8. Industri Hasil Tembakau (Pabrik Rokok) di Kabupaten Ciamis

No	Wilayah	Merk	Bahan Baku, Tenaga Kerja dan Produksi	Pemasaran
1	Rancah	PR Dasmil (Dasar Milik)	● Bahan Baku berasal dari Temanggung Jateng ● Tenaga Kerja 25-30 orang ● Produksi 5.000/hari (1 bulan 130.000 batang)	● Wilayah Ciamis (Sukadana, Sadananya, Pamarican) ● Harga Rp. 5.000, Harga Eceran di warung Rp. 7.000

Sumber: RPIK Ciamis, 2019-2023

Sebagai daerah penghasil Tembakau pada Tahun 2020 Kabupaten Ciamis mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp. 4,8 milyar, hal ini menjadi salah satu potensi yang mendukung pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Untuk menganalisis potensi ekonomi Pembentukan KIHT dilihat berdasarkan :

Product Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis

PDRB merupakan indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi, adapun PDRB kabupaten Ciamis Periode 2016-2020 yaitu:

Tabel 9. PDRB atas Dasar Harga Konstan Berdasar Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,21	1,67	2,87	1,47	3,82
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,13	2,99	-2,55	0,57	8,44
3.	Industri Pengolahan	5,18	7,14	5,06	-1,63	4,35
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	2,07	8,77	4,64	2,51	11,19
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,12	9,90	9,47	9,72	9,79
6.	Konstruksi	7,23	9,25	6,24	-7,41	6,45
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,98	4,99	5,84	-5,42	3,06
8.	Transportasi dan Pergudangan	5,24	5,72	6,53	-0,41	0,43
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,92	6,90	8,22	-7,87	-1,56
10.	Informasi dan Komunikasi	11,81	9,13	9,22	32,81	7,27
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,89	4,05	0,74	5,42	6,49
12.	Real Estate	9,26	9,62	9,55	8,24	9,94
13.	Jasa Perusahaan	8,36	8,99	9,11	-13,11	8,53
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,94	0,10	1,18	-1,03	-1,51
15.	Jasa Pendidikan	8,57	5,99	5,17	5,13	2,40
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,35	8,09	8,19	-5,36	7,47
17.	Jasa lainnya	9,63	6,71	7,15	-2,24	0,80
	Produk Domestik Regional Bruto	5,21	5,31	5,38	-0,14	3,66

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, 2022

Berdasarkan data tersebut terlihat sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi PDRB terbesar di Kabupaten Ciamis. PDRB provinsi Jawa Barat pada sektor industri sebesar Rp. 860.070,60 milyar, dan PDRB Kabupaten Ciamis pada sektor Industri sebesar Rp. 2.348,43 milyar, sehingga kontribusi Kabupaten Ciamis terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat sebesar 0,27%. Dengan dibangunnya Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) maka berpotensi meningkatkan PDRB yang berasal dari sektor industri.

Nilai Ekonomi Tembakau di Kabupaten Ciamis

Olahan tembakau di kabupaten Ciamis sampai saat ini belum optimal dalam menghasilkan nilai ekonomis karena hasil olahan tembakau masih dijual dalam keadaan bahan mentah (daun basah) seperti terlihat sebagai berikut :

Tabel 10. Nilai Ekonomi Tembakau di Kabupaten Ciamis Tahun 2020

No	Jenis Tembakau	Berat (kg)	Harga (Rp)	Nilai Ekonomi (Rp)
1.	Daun Basah	1.000	3.000	3.000.000

Sumber : RPIK Ciamis, 2020.

Berdasarkan tabel diatas nilai ekonomi tembakau di Kabupaten Ciamis sebesar Rp 3.000.000, bisa dikatakan bahwa olahan tembakau tersebut belum optimal, sehingga Kabupaten Ciamis juga perlu melakukan strategi agar bisa menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi karena tembakau merupakan tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam penelitian (Trimo & Hidayat, 2021) yang menunjukkan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari tembakau. Paradigma industri rokok (Industri Hasil Tembakau) harus diubah ke arah industry produk tembakau non rokok untuk menangkal tekanan publik yang sangat kuat, terutama dikaitkan dengan isu kesehatan. Produk tembakau non rokok dapat dihasilkan dari semua bagian tanaman tembakau (daun, akar, batang, bunga dan biji) dan diolah menjadi berbagai macam produk antara lain pupuk, pestisida, obat-obatan, minyak wangi, permen, cat, dan lain-lain.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tanaman tembakau terbesar di dunia. Industri hasil tembakau termasuk tembakau merupakan komoditas yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kualitas tembakau lokal sangat diperhitungkan di pasar internasional. Sehingga di Kabupaten Ciamis layak untuk mendirikan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) dilihat berdasarkan potensi ketersediaan bahan baku lokal, penyerapan tenaga

kerja, peningkatan kontribusi PDRB, peningkatan investasi dan peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau. Selain itu juga tembakau merupakan tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Referensi

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Anggraeni, D. N. (2018). *Analisis Penerimaan Dan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok (Studi Kasus Pada 38 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016)*. Universitas Brawijaya.

Ardhiarisca, O., Muspita, M., & Kustiasari, T. (2015). Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pengembangan Agribisnis Tembakau di Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmiah Inovasi*, *15*(3).

Bashori, I. A. (2022). HILIRISASI KOMODITAS TEMBAKAU DI KABUPATEN BLORA. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, *3*(1), 241–255.

Cahyanti, L. D. (2018). Strategi Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau Di Kabupaten Ponorogo. *AGRORADIX: Jurnal Ilmu Pertanian*, *1*(2), 42–51.

Candra, F. R. Y. (2022). *Pengaruh Penambahan Asam Humat Terhadap Hasil Tanaman Tembakau Besuki Na–Oogst H 382 (Nicotiana Tabacum L.)*. Politeknik Negeri Jember.

Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.

Kadar, P. (2018). Earmarking tax policy as an instrument of public service provision in regional development. *Проблеми Законності*, *141*, 223–228.

Kasim, K., & Taiyeb, A. M. (2022). GAMBARAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI DESA SUMBER HARUM KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA. *Andragogi Kesehatan BBPK Makassar*, *2*(1), 22–29.

Mepriyanto, N. D., & Saptutyningsih, E. (2019). Pengaruh Keberadaan Industri Hasil Tembakau (IHT) Terhadap Harga Rumah Menggunakan Pendekatan Hedonic Price: Studi Pada Kawasan Sekitar PR Sukun, Kudus, Jawa Tengah. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, *3*(2), 72–82.

Moshtari, S., & Sami, A. (2016). Evaluating and comparing complexity, coupling and a new proposed set of coupling metrics in cross-project vulnerability prediction. *Proceedings of the 31st Annual ACM Symposium on Applied Computing*, 1415–1421.

Sarosa, C. S., & Purwanti, E. Y. (2018). *Pengaruh kenaikan harga rokok, pendapatan dan karakteristik perokok terhadap konsumsi rokok di kota semarang*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

Trimo, L., & Hidayat, S. (2021). PEMBINAAN TEKNOLOGI PETANI DALAM PENGEMBANGAN ANEKA PRODUK TEMBAKAU NON ROKOK: LANGKAH MAJU KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal Agro Industri Perkebunan*, 35–45.

Utomo, M., Rusman, S., Sabrina, B., Lumranraja, T., & Wawan, J. (2016). Ilmu tanah dasar-dasar pengelolaan. *Prenedamedia Group. Jakarta*.

Wandita, D. T. (2020). Pengaruh Cukai Rokok terhadap Konsumsi Rokok serta Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Rokok. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, *14*(1), 159–165.

Wulandari, F. (2019). *Efektivitas pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dalam bidang kesehatan di Kota Surakarta tahun 2018.*